

Building Resilience to Prevent Violent Extremism through Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 5 | Vol. 3 | 2020

This Policy Brief Series is published as part of CONVEY Indonesia project organized by PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta and UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia aims to build peace in Indonesia and to prevent violent extremism and radicalism through a series of research-survey, policy advocacy, and public interaction based on the potential of religious education. CONVEY Indonesia project covers on the issues of tolerance, diversity and non-violence among youth.

Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme

| Social Bonding | Social Bridging | Social Linking |

CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

RESILIENSI KOMUNITAS PESANTREN TERHADAP RADIKALISME

| Social Bonding | Social Bridging | Social Linking |

Oleh: Irfan Abubakar & Idris Hemay

RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa pesantren disinyalir memiliki kerentanan terhadap radikalisme dan ekstremisme kekerasan (BNPT 2016). Di antara penyebab pesantren memiliki risiko kerentanan adalah lemahnya rasa kebangsaan dan nilai-nilai toleransi di dalam pendidikan pesantren tersebut. Selain itu, ketidakmampuan pesantren membangun hubungan dengan pemerintah menjadi faktor lain yang menyebabkan pesantren rentan terhadap penetrasi radikalisme. Tidak semua pesantren memiliki kemampuan menanamkan cinta tanah air dan toleransi. Pesantren yang lemah visi kebangsaannya dapat diperkuat ketahanannya melalui penciptaan faktor pelindung. Untuk itu, pemerintah kiranya perlu melakukan intervensi melalui kebijakan yang ada. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang paling relevan menjadi motor penggerak, selain juga BNPT memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pada pesantren-pesantren tertentu yang berada di bawah pembinaan BNPT.

LATAR BELAKANG MASALAH

Hasil studi tentang resiliensi komunitas pesantren terhadap radikalisme (Abubakar & Hemay, 2020) menemukan bahwa pesantren yang paling resilien dicirikan oleh identitas komunitas yang kuat. Namun identitas yang kuat saja tidak cukup, pesantren tersebut juga mampu berhubungan dengan kelompok lain

dalam semangat kebangsaan dan kebhinnekaan. Ciri penting lainnya, cakup membangun *link* dengan pemerintah. Dalam studi ini pesantren-pesantren Tradisional umumnya memiliki modal sosial yang cukup kuat. Disusul oleh Pesantren Gontor, Pesantren Muhammadiyah, lalu Pesantren Persis. Sementara itu, Pesantren Salafi diantara yang paling terbatas modal sosialnya. Satu-satunya faktor penangkal adalah doktrin ketaatan kepada pemerintah yang sah. Namun, doktrin ini tidak *ajeg*. Sebagian pengikut Salafi (Politik dan Jihadi) menolaknya karena dianggap menghambat kewajiban jihad dan amar makruf nahi munkar. Namun dengan doktrin tersebut pesantren Salafi yang a-politik (Salafi Puris) gigih menolak ISIS, JI, JAT, JAD, dan HTI. Dalam hal kewajiban mendirikan khilafah, Salafi Puris lebih tegas penolakannya daripada pesantren modernis.

Modal sosial yang menonjol dari pesantren Tradisional adalah kiyai dan Kitab Kuning. Sedangkan modal sosial pesantren Gontor dan afiliasinya bersumber dari nilai-nilai pondok yang disebut Panca Jiwa (Keikhlasan, Kesederhanaan, Ukhuwah Islamiyah, Kebebasan, dan Kemandirian). Sementara modal sosial pesantren Muhammadiyah dan Persis bersumber dari nilai-nilai kedua Ormas tersebut. Resiliensi semua tipologi pesantren sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mendayagunakan nilai-nilai tersebut untuk memperkuat identitasnya (*social bonding*), terikat dengan identitas kebangsaan (*social bridging*), serta membangun *link* dengan

pemerintah (*social linking*). Hubungan yang baik dengan pemerintah dapat memperkuat *social bridging*. Penerapan kurikulum pemerintah, seperti pengajaran PKn di pesantren, dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan. Namun, syaratnya hubungan tersebut mesti didasari oleh kepercayaan, timbal-balik, dan mencapai masalah bersama.

Guna merawat dan mengembangkan ketahanan jangka panjang pesantren menjalankan 4 strategi pembangunan resiliensi. *Pertama*, mencegah kontak dengan aktor atau jaringan radikal. *Kedua*, mendelegitimasi ideologi radikal. *Ketiga*, menghilangkan prasangka kebencian. *Keempat*, mengatasi isu “umat Islam dizholimi”. Keberhasilan dalam pembangunan ketahanan akan ditentukan oleh komitmen dan kapasitas pesantren mendayagunakan modal sosialnya. Disahkannya UU Pesantren No 18 Tahun 2019 mengindikasikan *social linking* yang kuat. Sejauhmana pesantren dapat memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh UU tersebut akan menentukan

4 Strategi Pembangunan Resiliensi

Strategi 1

mencegah kontak dengan aktor atau jaringan radikal

Strategi 2

mendelegitimasi ideologi radikal

Strategi 3

menghilangkan prasangka kebencian

Strategi 4

mengatasi isu “umat Islam dizholimi”

ketahanan yang kokoh di masa depan.

Pendidikan pesantren telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional melalui UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. Dengan disahkannya UU Pesantren No 18 tahun 2019, integrasi nasional semakin memiliki payung hukum yang kuat. Beberapa satuan pendidikan di pesantren juga telah memiliki peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Antara lain pelaksanaan satuan pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren didasarkan pada PMA No 18 tahun 2014. Begitu pula dengan Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PPKPPS) mengikuti ketentuan Kemenag RI melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendis No 6843 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis Salafiyah. Pesantren yang menyelenggarakan Ma'had Aly (Pesantren Tinggi) dan Tahfizul Qur'an diatur dalam lewat PMA No 13 Tahun 2014.

Beberapa satuan pendidikan telah berjalan, seperti Satuan Muadalah dan PPKPPS. Berdasarkan studi ketahanan pesantren terhadap radikalisme tahun 2019 terhadap beberapa pesantren yang mengikuti sistem Muadalah dan PPKPPS diperoleh temuan bahwa program tersebut belum tampak berjalan dengan baik. Di beberapa pesantren yang mengikuti PPKPPS, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak diajarkan di kelas karena tidak tersedia guru. Pihak pesantren hanya menyediakan diktat untuk dibaca oleh murid. Di beberapa pesantren lain, beberapa murid menunjukkan kesadaran sikap toleransi yang rendah. Malah di pesantren lain pengasuh dan beberapa guru di pesantren tersebut menunjukkan pemikiran yang radikal. Antara lain ditunjukkan dengan persetujuan terhadap ide penegakan

RESILIENSI KOMUNITAS PESANTREN BERBASIS KONEKSITAS SOSIAL



TRADISIONALIS



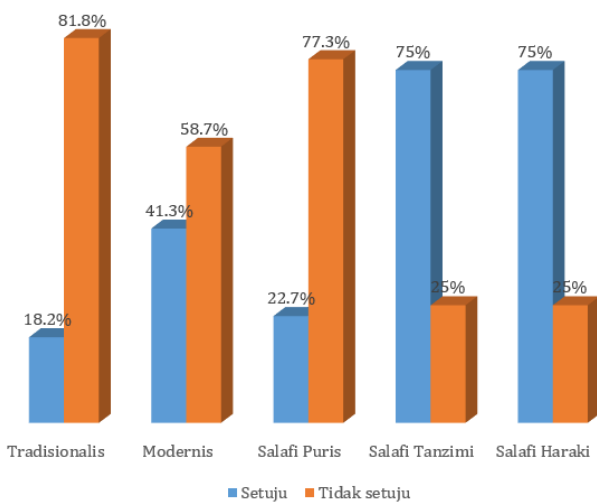
GONTOR & AFILIASI

	TRADISIONALIS	GONTOR & AFILIASI
SOCIAL BONDING	Figur Kyai	
	Kitab Kuning	
	Panca Jiwa & Motto Pondok	
	Nilai-Nilai Ormas	
	Doktrin Anti <i>Bughat</i>	
SOCIAL BRIDGING	Hubungan terhadap non muslim	
	Hubungan terhadap kelompok Islam yang berbeda	
	Hubungan terhadap kelompok minoritas	
	Penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan	
	Penolakan terhadap ideologi Khilafah	
SOCIAL LINKING	Integrasi ke dalam pendidikan nasional	
	Program pendidikan kewargaan (PKn/Civic Education)	

Tingkat Resiliensi



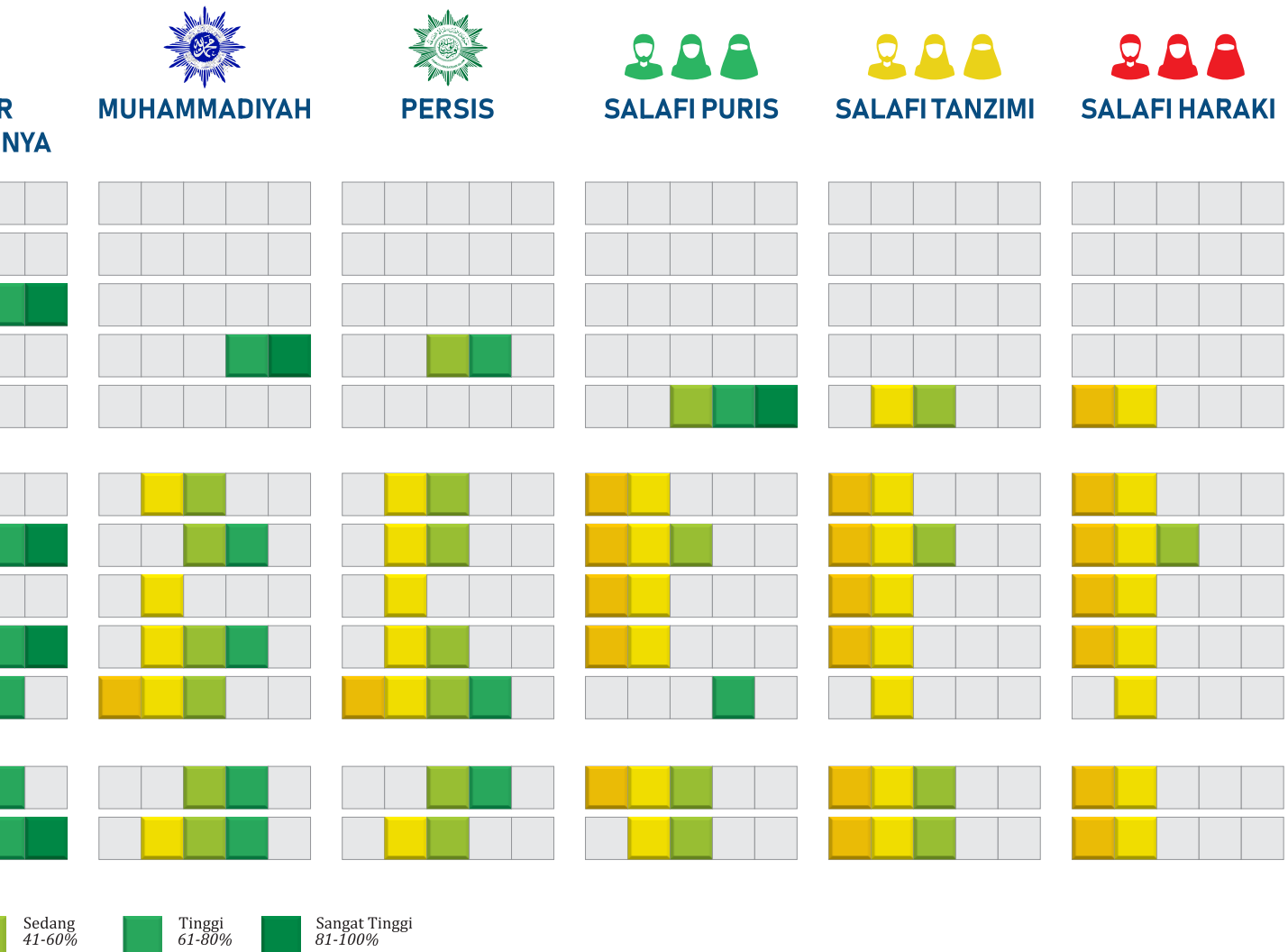
Grafik
Pandangan Pesantren terhadap Mendirikan Khilafah Islamiyah wajib hukumnya bagi umat



khilafah Islamiyyah. Seperti yang dapat dibaca pada tabel dibawah ini:

Pimpinan Pesantren Salafi Tanzimi (Pesantren WI) mengaku mengajarkan PKn di Pesantrennya. Namun dilihat dari persepsi guru-guru di pesantren 75% menyatakan setuju bahwa khilafah Islamiyyah wajib ditegakkan (Abubakar & Hedayat, 2020).

Namun di beberapa pesantren yang mengikuti program Muadalah, pengajaran PKn malah cukup berhasil. Salah satu faktor penunjang karena tenaga pengajar memiliki latar belakang akademik yang memadai. Di Pondok Tazakka, Batang, Jateng, mata pelajaran PKn



ada guru utama yang akan membimbing guru-guru lain yang mengampu mata pelajar tersebut (Abubakar & Hemay, 2020). Dengan memperhatikan fakta kelemahan dan *best practices* sudah saatnya Kementerian Agama RI melakukan review umum pengajaran PKn di satuan-satuan pendidikan di pesantren.

Beberapa pesantren Salafi yang diteliti belum terhubung dengan pemerintah. Salah satunya Pesantren As-Salam, Bima. Para pengurus pesantren sebelumnya pernah terlibat dalam jaringan ISIS dan ditangkap dan divonis penjara. Setelah keluar penjara, pimpinan pesantren mulai sadar dan memutuskan

untuk berpisah dari JAT dan ISIS. Namun mengingat baru saja terlepas dari pengurus pesantren masih menyimpan benih-benih radikal. Seperti yang tampak pada ungkapannya di bawah ini:

“Dulu memang pemahaman jihad kami dengan ISIS masih sama. Itu betul, tapi ini yang harus saya luruskan kembali bagaimana konsep jihad kami hari ini. Terus terang ketika saya keluar penjara banyak belajar, kemudian kita sudah pisah dengan ISIS sehingga konsentrasi kita di sini adalah dengan pemerintah

beramar makruf nahi mungkar. Seperti apa? Contoh, ada kezholiman yang dilakukan oleh pemerintah, dan peraturan yang tidak sesuai dengan aturan Islam kita jelaskan pakai aturan demo” (Muhajir (Muhajir, Pimpinan PP As-Salam, Bima).

“Al-Haq cuman Islam, dan Al-Batil ini termasuk nasionalisme. Hati-hati karena nasionalisme ini juga cetusan mereka juga. Musuh mereka itu adalah Islam. Ulama sekarang banyak yang tidak bias membaca zaman. Dan itu banyak di singgung dalam kitab nya Ibnu Taimiyah. Dialah kemudian yang membangkitkan semangat umat Islam untuk melawan tentara Mongol (Anwar, Pengurus PP As-Salam, Bima).

Mengingat mereka mengelola pesantren dan mengajarkan anak-anak remaja Muslim yang dikirim orang tuanya untuk menuntut ilmu dapat dibayangkan akan seperti apa proses pengajaran paham keagamaan dengan guru-guru yang pemahamannya sarat dengan ideologi Islamis. Dengan melihat kenyataan itu, BNPT dan Kemenag RI perlu membangun sinergi untuk merangkul pesantren As-Salam dan secara perlahan menintegrasikannya dalam sistem pendidikan yang ada di Kemenag RI.

REKOMENDASIKEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan di atas, Kemenag, Kemendikbud, dan BNPT, perlu melakukan koordinasi untuk menjalankan beberapa usulan kebijakan di bawah ini:

1. Melakukan review umum dampak pengajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah, madrasah, dan diniyah, yang diselenggarakan oleh pesantren. Sejauh-mana pengajaran PKn berdampak pada komitmen kebangsaan dan sikap toleransi para peserta didik
2. Melakukan evaluasi dan menggali faktor-faktor penyebab dampak positif dan dampak negatif dari pengajaran dilihat dari aspek konten materi, metode pengajaran serta ketersediaan guru yang berkualitas
3. Menyusun dan mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Pengajaran Pkn di masing-masing satuan pendidikan pesantren
4. Menyusun dan mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengajaran PKn di masing-masing satuan pendidikan pesantren
5. Khusus untuk pesantren yang dibawah pengawasan BNPT perlu dijajagi pengikutsertaannya dalam program-program integrasi pendidikan pesantren ke dalam pendidikan agama dalam sistem pemerintah

REFERENSI

- Abubakar, Irfan. "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Ponorogo: Menjaga Kemandirian Civil Society." Dalam *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, disunting oleh Chaider S. Bamulaim dan Irfan Abubakar, 217–54. Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner. "Pesantren and Madrasah: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia." *Schooling Islam, the Culture and Politics of Modern Muslim Education*, 2006, 172–98.
- Basri, Husen Hasan. "Pendidikan dan Paham Keagamaan Pesantren Nurussalam Ciamis." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 15, No. 2 (31 Agustus 2017), 141-160.
- Borum, Randy. "Psychological Vulnerabilities and Propensities for Involvement in Violent Extremism." *Behavioral Sciences & the Law* 32, No. 3 (Mei 2014), 286–305.
- Bruinessen, Martin van. "'Traditionalist' and 'Islamist' Pesantren in Contemporary Indonesia." Dalam Farish Noor, Yoginder Sikand, dan Martin van Bruinessen. *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkage*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Carpenter, Ami C. "Resilience: Conceptual Foundations." Dalam *Community Resilience to Sectarian Violence in Baghdad*, disunting oleh Ami C. Carpenter, 63–80. *Peace Psychology Book Series*. New York, NY: Springer, 2014.
- Dalgaard-Nielsen, Anja, dan Patrick Schack. "Community Resilience to Militant Islamism: Who and What?: An Explorative Study of Resilience in Three Danish Communities." *Democracy and Security* 12, No. 4 (1 Oktober 2016), 309–27.
- Ellis, B. Heidi, dan Saida Abdi. "Building Community Resilience to Violent Extremism through Genuine Partnerships." *American Psychologist* 72, No. 3 (April 2017), 289–300.
- Nash, Carolyn, Yulia Nesterova, dan Kenneth Primrose. *Youth Lead Guide on Prevention of Violent Extremism through Education*. New Delhi: UNESCO & MGIP, 2017.
- Pohl, Florian. "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia." *Comparative Education Review* 50, No. 3 (2006): 389–409.
- _____. *Islamic Education and the Public Sphere: Today's Pesantren in Indonesia*. Münster: Waxmann Verlag GmbH, Germany, 2009.
- United Nations Development Programme (UNDP). "Preventing Violent Extremism through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Respect for Diversity: A Development Response to Addressing Radicalization and Violent Extremism." New York: UNDP, 2016.
- UNESCO. *A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism*. Paris: UNESCO, 2016
- Van Metre, Lauren. *Community Resilience to Violent Extremism in Kenya*. Washington D.C: United States Institute of Peace (USIP), 2016.
- Wagemakers, Joas. "Salafism." *Oxford Research Encyclopedia of Religion*, 5 Agustus 2016.
- Weine, Stevan M. "Building Resilience to Violent Extremism in Muslim Diaspora Communities in the United States." *Dynamics of Asymmetric Conflict* 5, No. 1 (1 Maret 2012), 60-73.
- Weine, Stevan M, dan William Braniff. "Empowering Communities to Prevent Violent Extremism." Dalam *The Handbook of the Criminology of Terrorism*, 449–67. John Wiley & Sons, Ltd, 2017.
- Weine, Stevan M, Schuyler Henderson, Stephen Shanfield, Rupinder Legha, dan Jerrold Post. "Building Community Resilience to Counter Violent Extremism." *Democracy and Security* 9, No. 4 (September 2013), 327–33.
- Wiktorowicz, Quintan. "Anatomy of the Salafi Movement." *Studies in Conflict & Terrorism* 29, No. 3 (1 Mei 2006), 207–39.
- Woodward, Mark, Inayah Rohmaniyah, Ali Amin, dan Diana Coleman. "Muslim Education, Celebrating Islam and Having Fun as Counter-Radicalization Strategies in Indonesia." *Perspectives on Terrorism* 4, Issue 4 (Oktober 2010), 28–50.



**Fostering Tolerant Religious Education to Prevent Violent
Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten 15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:

